

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Belajar merupakan praktek memodifikasi dengan upaya pengajaran dan pelatihan, seseorang atau komunitas dapat mengembangkan sikap dan perilaku manusia yang matang, prosedur instruksional, strategi, dan perilaku (Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud, 2012, hlm. 263). Pendidikan merupakan media yang menghasilkan manusia yang berkualitas. Maka untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu proses pembelajaran, karena pembelajaran dapat memberikan kearifan kepada manusia dalam hal pemahaman, tingkah laku, dan kemampuan.

Corruption berasal dari bahasa latin yang artinya busuk, retak, goyang, twist, atau suap. *Transparency International* korupsi digambarkan sebagai tindakan pejabat publik, termasuk legislator dan pegawai negeri, yang menguntungkan diri sendiri atau orang-orang yang dekat dengannya secara melawan hukum dan diam-diam dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Patra, 2018, hlm. 72).

Korupsi biasanya dilakukan oleh politisi yang telah memenangkan kepercayaan publik. Sebaliknya, mereka dengan mudahnya mengkhianati kepercayaan rakyat. Mereka menggelapkan uang negara dan bersenang-senang melakukannya sementara negara menjadi objek tindakan mereka akan memberi kompensasi atas luka-luka mereka. Korupsi di dunia ini telah berkembang menjadi sebuah "kebiasaan", dan kini menjamur ke titik kemustahilan

pemberantasan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi. Namun korupsi tetap ada di dunia ini. Mayoritas alasan individu bersedia melakukan tindak pidana korupsi adalah karena kurangnya pengetahuan pribadi tentang perangkat korupsi. Para koruptor tidak mungkin kembali ke dunia nyata karena mereka sudah terbiasa.

Di Indonesia, sikap tidak jujur sudah merebak dimana-mana, bukan hanya di kalangan pejabat pemerintah namun sikap tidak jujur bisa dilakukan oleh setiap orang dari aspek terkecil sampai aspek yang sangat besar sehingga merugikan masyarakat. Sehingga perlu adanya pendidikan untuk menumbuhkan sikap jujur, keterbukaan, kerja keras, keberanian, kesederhanaan, keadilan, kedisiplinan, komitmen. Sebagai contoh, ketika tibanya Ujian Nasional sering kali menjadi teater total ketidakjujuran baik dari aktor pejabat, guru, percetakan sampai orang tua yang sibuk mencari bocoran soal juga menyogok.

Untuk mengatasi masalah korupsi, diperlukan perubahan positif. Selain politisi, generasi muda harus mau menjunjung tinggi kejujuran dan kesetiaan kepada negara dan masyarakat, di mana perilaku tidak etis akan terjadi baik pada guru maupun siswa. Misalnya, berjudi, telat, absen, dan lain sebagainya. Tingkah laku ini nantinya akan digunakan untuk menandakan tindakan yang tidak etis. Tindakan korupsi ternyata bukan saja menyoal penggelapan uang milik negara yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Namun tindakan korupsi juga merupakan bentuk unmoral yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah Indonesia mencoba berbagai metode untuk memerangi korupsi. Salah satu upaya untuk menangkal dan memberantas korupsi adalah

KPK, lembaga otonom yang menangani langsung korupsi. Namun, kegiatan penindakan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh KPK dalam memberantas kasus korupsi, sehingga lembaga pendidikan juga harus melakukan tindakan proaktif. Kurikulum anti korupsi di perguruan tinggi adalah salah satu prakarsa anti korupsi jangka panjang yang paling berhasil. Ini sebagai upaya menjaga agar korupsi tidak sampai ke tangan generasi penerus. Karena generasi muda lah yang akan menduduki jabatan mantan pejabat. Apalagi generasi milenial mudah terpengaruh oleh lingkungannya.

Diharapkan dengan menerapkan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, akan lebih mudah melatih dan mempengaruhi generasi muda dengan menanamkan cita-cita anti korupsi, agar tidak melakukan tindak pidana korupsi hingga terkena dampak sebelumnya. Karena pendidikan tinggi merupakan tatanan kritis untuk menanamkan cita-cita anti korupsi. Karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sangat merugikan bangsa dan negara, maka pendidikan anti korupsi menjadi salah satu fondasi yang sangat mampu memberantas bahaya korupsi sejak dini. Kurikulum anti korupsi mahasiswa berupaya mendapatkan informasi yang cukup banyak mengenai korupsi dalam berbagai manifestasinya dan pemberantasannya, serta menanamkan prinsip anti korupsi. Kurikulum anti korupsi dapat diterapkan pada mata kuliah Pancasila dan PKN di perguruan tinggi. Pada tahun 2018, pemerintah memperkenalkan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) tentang kurikulum anti korupsi di semua perguruan tinggi Indonesia. Dimana pemerintah berniat untuk memberlakukan MKDU pada tahun 2019. Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah hanya akan menyelenggarakan MKDU

tentang pendidikan anti korupsi pada tahun 2019, UNPAS telah melaksanakan kursus-kursus tersebut sebelum pemerintah meluncurkan MKDU.

Pendidikan anti korupsi tidak hanya mampu dilaksanakan dengan materi kuliah di perguruan tinggi saja. Namun dapat dilakukan melalui kegiatan internal kampus dengan mengadakan pelatihan anti korupsi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa atau Himpunan Mahasiswa Jurusan, siaran anti korupsi di radio atau ditelevisi kampus atau dengan pengembangan nilai-nilai leluhur yang mendukung sikap anti korupsi seperti UKM kepramukaan. Disini peneliti ingin mengetahui seberapa penting pendidikan anti korupsi terhadap mahasiswa Prodi PPKn Universitas Pasundan (UNPAS) yang ingin menjadi pelopor bidang gerakan anti korupsi dan bagaimana penerapan perkuliahan anti korupsi pada mahasiswa Prodi PPKn Universitas Pasundan.

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis melakukan penelitian “**Analisis Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi terhadap Urgensi Pencegahan Perilaku Tindak Korupsi kepada Mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewargaraan (PPKN)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan berikut dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi, desain, strategi dan evaluasi yang dapat dilihat sebagai unit pengembangan karakter dalam pendidikan anti korupsi di Universitas Pasundan?

2. Bagaimana keterkaitan pendidikan anti korupsi terhadap pembentukan karakter anti korupsi?
3. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap tindak korupsi sesudah belajar materi anti korupsi?
4. Bagaimana peran mata kuliah pendidikan anti korupsi terhadap mahasiswa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh rumusan masalah. Di bawah ini adalah tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Mengapresiasi peran kritis pendidikan anti korupsi di Program Studi PPKn
2. Hal ini untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran anti korupsi di Program Studi PPKn
3. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran anti korupsi di Program Studi PPKn
4. Kajian ini akan mengkaji dampak pembelajaran anti korupsi terhadap mahasiswa sebagai sarana pencegahan korupsi.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar menguntungkan secara teknis dan praktis bagi publik.

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai pengetahuan dan menjadi referensi pembaca serta sebagai masukan untuk perkembangan pendidikan di Indonesia.

## 2. Praktis

### a. Pembaca

Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk membantu pembaca mengapresiasi nilai pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, sekaligus sebagai agen reformasi kehidupan sosial dan negara bersih yang bebas dari kemungkinan korupsi. Selain itu, pembaca bersedia untuk mencegah diri mereka sendiri melakukan tindakan yang tidak etis.

### b. Bagi peneliti

Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas pemahaman dan kesadaran pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.

### c. Bagi peneliti berikutnya

Temuan studi ini harus dilihat sebagai titik awal bagi sarjana lain untuk melakukan studi terkait di masa mendatang.

## E. Definisi Operasional

1. Muzakkir (2015, hlm. 113) pengertian pendidikan secara sederhana dan umum usaha manusia menumbuhkan potensi baik jasmani maupun rohani sejalan dengan cita-cita dan budaya masyarakat yang dikembangkan dan diwarisi untuk generasi yang akan datang

2. Umar (2011, hlm. 108) yaitu individu yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan negara.
3. Tindak korupsi Merupakan salah satu jenis pidana yang menarik perhatian masyarakat. Tindak pidana korupsi berdampak di segala segi pembangunan
4. Pendidikan Korupsi adalah salah satu upaya pencegahan yang dilakukan dengan memberitahukan tentang korupsi, pencegahan perbuatan korupsi dan bertujuan untuk upaya menumbuhkan nilai integritas yang dimulai sejak dini. Pendidikan anti korupsi menjadi uapaya pencegahan yang dilakukan untuk menghilangkan budaya korupsi (Rusdini, Rachman and Handoyo, 2016, hlm. 25) di mana pendidikan anti korupsi dapat dilakukan pada keluarga, masyarakat dan juga di sekolah dan universitas.
5. Urgensi adalah sesuatu yang membutuhkan pertimbangan segera.
6. Urgensi sains mengacu pada seberapa relevan suatu studi atau penjelasan rasional apa yang diberikan untuk menjelaskan mengapa studi ini penting.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar skripsi lebih sederhana, maka disusunlah skripsi secara sistematis, sebagai berikut:

##### **1. BAB I**

Dalam tahap ini menguraikan mengenai aspek penting terdapat dalam penelitian sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

##### **2. BAB II**

Tahap ini tentang penekanan teoritis yang bertumpu pada temuan-temuan analisis gagasan, prinsip, strategi, dan kerangka berpikir dalam kaitannya dengan masalah penelitian.

### 3. BAB II

Tahapan penting dalam penelitian berupa prosedur akademis dalam menyeleksi, mengolah dan membuat suatu kesimpulan akademis yang mampu menunjukkan kebaharuan dalam penelitian.

### 4. BAB IV

Tahap ini mengemukakan temuan analisis mata kuliah pendidikan anti korupsi terhadap urgensi pencegahan perilaku tindak korupsi kepada mahasiswa prodi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (ppkn).

### 5. BAB V

Menjelaskan intisari dalam riset yang telah dikerjakan, begitupula dalam bagian ini memberikan informasi berupa rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.